



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAIFRIZON
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 62553

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/160 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 27340 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 153.500.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 17.200.000**

**D. SURAT BERTAHAGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 205.549.809**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. ----**

**Sub Total**

**Rp. 2.526.249.809**

**III. HUTANG**

**Rp. 375.794.091**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

**Rp. 2.150.455.718**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : ZARDI SYAHRIR
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN
- NHK** : 878501

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	---
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	67.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SPM. SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, DATSUN MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	25.281.220
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	92.281.220
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	92.281.220

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : ISMELDA JENREINI
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN
- NHK** : 887246

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>680.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>336.500.000</b>
1. MOTOR, MIO SOUL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOTOR, SCOOPY NEW Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2024, LAINNYA Rp. 320.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.053.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.020.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>33.000.000</b>

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **UDLIL IMAN ZUL**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **935207**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>891.600.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000		
2. Tanah Seluas 333 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 180.000.000		
4. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 171.600.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>203.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA COROLLA Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2020, LAINNYA Rp. 155.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.881.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.223.675</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.944.556</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>



Sub Total	Rp.	1.154.649.231
III. HUTANG	Rp.	37.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.117.649.231

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : KORNELIUS SARAGIH
- Jabatan** : BENDAHARA
- NHK** : 965348

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	---
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	59.000.000
1. MOBIL, TOYOTA LIMO 1,5 STD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.		
50.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.		
9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	10.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	69.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	150.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-81.000.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : YANTI MANNOVITA
- Jabatan** : BENDAHARA
- NHK** : 1000082

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>350.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>174.000.000</b>
1. MOBIL, XENIA X Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, NMAX NMAX NEO VERSION Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>863.760</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>524.863.760</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.178.720</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>233.685.040</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : SRI MUHARENI
- Jabatan** : BENDAHARA
- NHK** : 987540

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>650.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>157.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA HRV/ECVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO/125 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.203.654</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>833.203.654</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>833.203.654</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IHSAN NURDIN
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 987607

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>99.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, WARISAN Rp. 95.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.173</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>299.200.173</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>211.564.970</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.635.203</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.